

Abstrak

Barang Milik Negara (BMN) adalah salah satu aset negara yang harus dijaga dan dipelihara serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adanya pemanfaatan BMN dapat menjadi revenue center yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan terdapat cost efficiency yaitu pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan. Penulis memilih Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai subjek karya tulis dengan tema pengelolaan BMN karena terdapat tanah yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa oleh PT Energi Perkasa Abadi dan bangunan berupa rumah dinas yang saat ini masih dihuni oleh keluarga pensiunan sehingga masih menjadi permasalahan dalam pengawasan dan pengendaliannya serta belum terselesaikan. Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan BMN berupa Tanah dan Bangunan serta pihak-pihak yang berperan didalamnya, menganalisis kendala yang dihadapi serta membandingkan antara ketentuan yang berlaku dengan kenyataan dalam pengelolaan BMN. Penulis menggunakan metode wawancara kepada Bapak Adhitya Prihatma selaku petugas BMN untuk mendapatkan data berupa dokumen terkait pengelolaan BMN. Dokumen tersebut dilakukan observasi untuk memastikan pengelolaan BMN yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Hasil observasi menyimpulkan bahwa seluruh proses pengelolaan BMN berupa tanah dan bangunan yang terjadi selama tahun 2023 telah sesuai dengan prosedur dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. Kendala yang masih belum dapat ditemukan solusi terbaiknya yaitu terkait penghunian rumah dinas oleh keluarga pensiunan. Penulis menyarankan untuk berkonsultasi kepada kantor pusat terkait progress penyelesaian masalah penghunian rumah dinas oleh keluarga pensiunan yang akan dijadikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar segera dapat ditemukan solusi yang terbaik.

Kata kunci: *Pengelolaan BMN, Sewa BMN, Rumah dinas keluarga pensiunan.*

Abstract

State Property (BMN) is one of the state assets that must be guarded, maintained and utilized as well as possible. The use of BMN can become a revenue center that generates non-tax state income and there is cost efficiency, namely the government does not need to pay maintenance costs. The author chose the Regional Office of the Directorate General of Treasury of East Kalimantan Province as the subject of a paper with the theme of BMN management because there is land that is used in the form of lease by PT Energi Perkasa Abadi and a building in the form of an official residence which is currently still occupied by a retired family so it is still a problem in monitoring and control and has not yet been resolved. The purpose of preparing this Final Assignment Paper (KTTA) is to understand the process of managing BMN in the form of Land and Buildings and the parties who play a role in it, analyzing the obstacles faced and comparing the applicable provisions with the reality in managing BMN. The author used the interview method with Mr. Adhitya Prihatma as a BMN officer to obtain data in the form of documents related to BMN management. This document is subject to observation to ensure that the BMN management carried out is in accordance with applicable regulations and policies. The observation results concluded that all BMN management processes in the form of land and buildings that occurred during 2023 were in accordance with applicable procedures, regulations and policies. An obstacle for which the best solution has not yet been found is related to the occupancy of official residences by retired families. The author suggests consulting with the head office regarding the progress of resolving the problem of occupying official residences by retired families which will be used as findings by the Financial Audit Agency (BPK) so that the best solution can be found immediately.

Keywords: Management of state property, Rent of state property, Retired family official residence.